

**JURNAL**  
**ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN**



**Di Terbitkan Oleh :**  
**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**  
**Universitas Siliwangi Tasikmalaya**

<b>JIPP</b>	<b>Vol.1</b>	<b>Nomor 2</b>	<b>Halaman</b> <b>119-260</b>	<b>Tasikmalaya</b> <b>Januari 2013</b>	<b>ISSN</b> <b>2301 - 8453</b>
-------------	--------------	----------------	----------------------------------	---	-----------------------------------



**JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN**  
**Volume 1, Nomor 2, Januari 2013**

---

Terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli, dalam satu volume ada empat nomor. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian. Artikel telaah (*review article*) dimuat atas undangan ISSN. 2301 - 8453

**Penanggung Jawab**

Budi Rahmat  
Edi Kusmayadi

**Penyunting**

Akhmad Satori

**Wakil Penyunting**

Taufik Nurohman

**Penyunting Pelaksana**

Mohammad Ali Andrias  
Subhan Agung  
Hendra Gunawan  
Fitriani Yuliyawati

**Sirkulasi dan Tata Usaha**

Rino Sundawa Putra  
Wiwi Widiastuti

**Pembantu Tata Usaha**

Ika Kartika

---

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha :** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya Telp. 0265-330634/ 081328774850 Fax. 0265-325812 email. [jipp\\_unsil@yahoo.co.id](mailto:jipp_unsil@yahoo.co.id) web site. <http://fisip.unsil.ac.id>

---

**Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JIPP)** merupakan edisi lanjutan dari **Aliansi: Jurnal Politik dan Pemerintahan** yang tidak terbit lagi. **JIPP** terbit sejak 30 Juli 2012, oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di kertas HVS A4 spasi ganda lebih kurang 30 halaman, dengan format seperti tercantum dalam halaman belakang (Panduan Penulisan Naskah JIPP). Naskah yang masuk dievaluasi, disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

---

**Dicetak di Percetakan LPPM Press, Isi diluar Tanggung jawab Percetakan**



**JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN**  
**Volume 1, Nomor 2, Januari 2013**

---

**DAFTAR ISI**

Dewan Penyunting	ii
Daftar Isi	iii
Pengantar Penyunting	v
<b>Refleksi Pilkada dan Model Kepemimpinan Daerah</b>	
<i>Adhi Iman Sulaiman</i> , Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	119-138
<b>Politik Kekerabatan Dalam Proses Pencalonan Legislatif Pemilu 2009</b>	
<i>Mohtar Haboddin</i> , Universitas Brawijaya Malang	139-150
<b>Sengketa Aset Pasca Pemekaran Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya</b>	
<i>Subhan Agung</i> , Universitas Siliwangi Tasikmalaya	151-164
<b>Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia</b>	
<i>Syah Firdaus</i> , Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	165-184
<b>Budaya Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya</b>	
<i>Akhmad Satori, Wiwi Widiastuti &amp; Hendra Gunawan</i> , Universitas Siliwangi Tasikmalaya	185-208
<b>Demokrasi Dalam Pandangan Zaenal Abidin Ahmad</b>	
<i>Ahmad Sabiq &amp; Syah Firdaus</i> , Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	209-216
<b>Habitus Politik Gerakan Islam Moderen di Kota Tasimalaya</b>	
<i>Hendra Gunawan</i> , Universitas Siliwangi Tasikmalaya	217-226
<b>Transnational Islamic Movement (Studi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia)</b>	
<i>Sulaiman Kurdi</i> , IAIN Raden Antasari, Banjarmasin	227-244
<b>Strategi Pengembangan Masyarakat (<i>Community Develovment</i>) Melalui Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Kearifan Lokal</b>	
<i>Waluyo Handoko</i> , Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	245-260
Indeks Pengarang Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan (JIPP)	260.1
Indeks Mitra Bebestari Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan (JIPP)	160.2
Pedoman Penulisan Naskah JIPP	160.3-160.6

---





**JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN**  
**Volume 1, Nomor 2, Januari 2013**

---

**PENGANTAR PENYUNTING**

Alhamdulillah telah terbit jurnal edisi Januari 2013, dengan tetap menyajikan pemikiran yang beragam dari hasil telaah dan penelitian yang terbaru. Jurnal edisi kali ini di bagi menjadi tiga pokok bahasan yang menarik.

Refleksi dan evaluasi pemilihan kepala daerah dan model kepemimpinan menjadi tulisan pembuka jurnal edisi kali ini. Iman Adhi Sulaiman mengupas betapa problematika dalam pilkada mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemilihan, sampai ketika menjabat kepala daerah, menjadi salah satu penyebab adanya kasus korupsi di daerah sebagai ciri model kepemimpinan transaksional politik yang dominan kekuatan modal finansial dan modal politik (kekuasaan).

Ironisnya, model kepemimpinan tersebut di pengaruhi oleh budaya politik kekerabatan atau klan sangat kental terjadi dalam panggung politik negeri ini, baik ditingkat nasional maupun lokal yang kemudian di sorot oleh Muhtar Haboddin, Dalam tulisanya mencoba menghadirkan jejak langkah politik kekerabatan yang terjadi pada pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Hasilnya sangat menakjubkan bahwa dalam proses politik kekerabatan menyebar disejumlah partai politik.

Problematika yang terjadi dalam pesta demokratisasi tersebut boleh jadi salah satu penyebab geliat golput yang semakin meningkat, seperti yang menjadi titik fokus telaah yang di paparkan Syah Firdaus dalam tulisannya. Dengan pendekatan konsep *rational choice* untuk menelaah golput, tulisan ini menjelaskan fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politis maupun administratif. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi bagaimana menekan persentase angka golput setiap kali pemilu digelar .

Harus diakui bahwa, keragaman dinamika proses pemekaran dan pasca pemekaran melahirkan model variatif di setiap daerah yang menarik dan produktif, namun tidak sedikit juga dampak pasca pemekaran yang melahirkan gejala kontraproduktif bagi tujuan

pemekaran itu sendiri yakni akses dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Inilah yang menjadi pemaparan Subhan Agung dan Fitriyani Yuliawati dalam tulisan selanjutnya.. Solusi yang ditawarkan tulisan ini dalam mengatasi sengketa dengan harus melibatkan pihak ketiga, semisal pemerintah pusat dengan memegang prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak atau solusi “jalan tengah”.

Akhmad Satori, dkk. selanjutnya mengeksplorasi bagaimana budaya politik masyarakat Kampung Naga yang mempunyai ikatan tradisional yang kuat dan mengakar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Kampung Naga adalah masuk pada tipe budaya politik subjek parokial (*the parochial subject cultur*). Adanya lembaga adat yang kuat disamping lembaga formal (pemerintahan) membuktikan bahwa kekuasaan adat lebih mempunyai peran dominan dibandingkan kekuasaan pemerintahan.

Tiga tulisan selanjutnya, mengangkat tema politik Islam, Pandangan Zainal Abidin Ahmad tentang demokrasi tampak dipengaruhi oleh ide demokrasi parlementer Barat dan sekaligus prinsip-prinsip ajaran Islam tersaji dalam tulisan Ahmad Sabiq. Terkait dengan Islam ia berpandangan bahwa Islam adalah agama demokratis bahkan merupakan pionir dari demokrasi parlementer. Pemikiran politiknya pada masa itu relatif radikal dan menempatkannya di luar arus utama teori politik Islam yang ada.

Apa yang pandang oleh Sainal Abidin Ahmad bisa jadi mempunyai benang merah dengan pola gerakan modern Islam di Tasikmalaya yang berasal dari gerakan akar rumput organisasi Islam ataupun partai Islam membentuk pola yang sama sehingga terwujud dalam struktur pemerintahan di Tasikmalaya. Struktur batin, penghatayan dan pandangan umat Islam dalam memadam dunia ini membentuk sikap yang relative sama sehingga menghasilkan perilaku yang sama dari generasi ke generasi. Pola kebiasaan yang sama ini melahirkan habitus politik yang menstruktur gerakan modern Islam di Tasikmalaya dewasa ini.

Kemunculan berbagai gerakan Islam pasca jatuhnya Soeharto juga dicermati oleh Sulaiman Kurdi. Gerakan Islam yang disebutkan di atas seringkali disebut gerakan radikal, ekstrem, militan ataupun fundamentalisme. Kehadiran mereka tidak dapat dielakan dari gejala yang terjadi di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan pemikiran HTI dan mereka memberikan tawaran berupa ideologi berbasis Islam. Karena mereka menganggap ideologi-ideologi yang ada tidak memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang multidimensional yang dihadapi oleh umat manusia sehingga mereka menawarkan “wacana” berupa penegakan Syariat Islam dan seperangkat aturan-aturan lainnya.

Berbeda dengan kedua tema diatas, Waluyo handoko mencoba menutup jurnal edisi kali ini dengan menjelaskan bahwa model development masyarakat sangat strategis

dan penting melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi (koperasi masyarakat ekonomi) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk desa. Tulisan ini menunjukkan bahwa program pengembangan Koperasi (koperasi masyarakat ekonomi) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi model pengembangan masyarakat sebagai strategi konstruktif (membangun) dan solusi (*problem solving*) dan transformatif (potensi pengolahan dan sumber daya) untuk mencapai masyarakat pembangunan pedesaan bisa lebih adil dan makmur berdasarkan kearifan lokal

*Last but not least*, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan sumbangan pemikiran dalam jurnal ini. Akhirnya kami berharap, apa yang tersaji dalam jurnal edisi kali ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, dan menjadi suplemen yang menambah kecerdasan kita. Selamat membaca.

Tasimalaya, Januari 2013  
Penyunting



## **HABITUS POLITIK GERAKAN ISLAM MODERN DI TASIKMALAYA**

Oleh :

Hendra Gunawan.,M.Si<sup>1</sup>  
hendragunawan@unsil.ac.ad

### *Abstraksi*

*Gerakan modern Islam di Tasikmalaya yang berasal dari gerakan akar rumput organisasi Islam ataupun partai Islam membentuk pola yang sama sehingga terwujud dalam struktur pemerintahan di Tasikmalaya. Struktur batin, penghatayan dan pandangan umat Islam dalam memadang dunia ini membentuk sikap yang relative sama sehingga menghasilkn perilaku yang sama dari generasi ke generasi. Pola kebiasaan yang sama ini melahirkan habitus politik yang menstruktur gerakan modern Islam di Tasikmalaya dewasa ini.*

*Kata kunci : habitus politik, gerakan Modern Islam*

### *Abstract*

*The modern Islamic movement in Tasikmalaya from grassroots movements Islamic organization or Islamist party formed the same patterns that manifested in the structure of government in Tasikmalaya. Inner structure, appreciation and Muslims views of looking at the world is shaping attitude relatively the same shape so yielding the same behavior from generation to generation. This same pattern of political structuring habitus birth of modern Islamist movement in Tasikmalaya today.*

*Keywords: political habitus, Modern Islamic movement*

## **A. Pendahuluan**

Munculnya partai-partai Islam belakangan ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan akademisi maupun dikalangan Islam itu sendiri. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam atau yang secara salah kaprah diistilahkan sebagai "repolitisasi Islam"<sup>2</sup>. Penilaian yang pertama bernada positif, karena seperti agama-agama lain, Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Penilaian

---

<sup>1</sup> Staff Dosen Fisip Unsil

<sup>2</sup> Adian,Husaeni, *Pesantren dan Pergulatan Politik Modern*,hal 43

kedua, jika istilah itu dipahami secara benar, adalah negatif. Istilah "politisasi" (terhadap apa saja) selalu merupakan bagian dari rekayasa yang bersifat *pejorative* atau *manipulatif*. Bisa dibayangkan apa jadinya jika hal tersebut dikenakan pada sesuatu yang mempunyai sifat ilahiyah (*devine*) seperti agama Islam<sup>3</sup>.

Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Masyhur Amin, bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam<sup>4</sup>. Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara deferminan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Salah satu isu politik yang sering menempatkan kelompok Islam pada posisi dilematis yang sering dihadapi politik Islam adalah pemosisian Islam *vis a*

---

<sup>3</sup> Tidak diketahui secara persis apa yang dimaksud oleh sementara orang yang melihat maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai suatu fenomena yang dapat diberi label repolitisasi Islam. Meskipun demikian, kalau menilik indikator utama yang digunakan sebagai dasar penilaian itu adalah munculnya sejumlah partai politik yang menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa yang dimaksud adalah fenomena munculnya kembali kekuatan politik Islam. Hal yang dmeikian itu di dalam perjalanannya selalu terbuka kemungkinan untuk "memolitikkan" bagian-bagian yang menjadi dasar idiologi partai-partai tersebut.

<sup>4</sup> M.Masyhur Amin, *Dinamika Islam; Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*”, hal 75

*vis* negara yang berdasarkan Pancasila. Walaupun umat Islam mempunyai andil yang sangat besar dalam menegakkan negara melalui perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan dan menegakkan kemerdekaan, namun untuk mengisi negara merdeka kelompok Islam tidak selalu pada posisi yang menentukan. Pada awal kemerdekaan, kelompok Islam yang mempunyai andil yang sangat besar dalam mengganyang PKI dan menegakkan Orde Baru tidak terwakili secara proporsional pada BPUPKI atau PPKI dan karenanya tidak memperoleh kesempatan untuk ikut menyelenggarakan roda pemerinthan. Mereka bagaikan "orang yang mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan mereka ditinggal di belakang"<sup>5</sup>. Sekarang pada era reformasi, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam. Pengendali reformasi dan kehidupan politik nasional akan berada pada pihak atau kelompok kepentingan politik yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik<sup>6</sup>.

Selain problem yang berasal dari dikotomi santri abangan di kalangan umat Islam<sup>7</sup>, politik Islam juga menghadapi problema yang berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu

---

<sup>5</sup> Hendra Gunawan, "Dinamika Politik Islam Di Aras Lokal", hal 4

<sup>6</sup> Pada masa modern sekarang ini sumber-sumber kekuatan politik tidak hanya bertumpu pada masa, tetapi juga pada materi, ide, dan informasi. Kelompok politik Islam mungkin mempunyai kekuatan pada masa atau ide, tetapi kurang pada materi dan informasi. Dua yang terakhir ini justru dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan politik lain.

<sup>7</sup> Dikotomi ini adalah konsekuensi logis dari proses islamisasi yang tidak merata di berbagai daerah Nusantara serta perbedaan corak tantangan kultural yang dihadapi. Dikotomi ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Clifford Geertz ketika meneliti sebuah daerah kecil di pinggiran Jawa Tengah

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini ditandai oleh banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan kelompok Islam, baik yang berdasarkan diri pada ideologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang lainnya. Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 32 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik. Sehingga kemenangan partai Islam di jalur politik mungkin akan terbuka lebar.

Kemenangan partai-partai Islam di Tasikmalaya misalnya, baik di Kota maupun di Kabupaten, pada Pemilu 1999 dan 2004 serta 2009 mengantarkan banyak aktifisnya untuk duduk di kursi-kursi DPRD dan jabatan-jabatan birokrasi struktural. Selain itu kemenangan pada tahun Pemilu 1955, Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009, dapat dipahami juga sebagai hasil dari pertarungan politik praktis.

Merealah yang kemudian menjadi garda depan untuk memobilisasi wacana Islam menjadi sesuatu yang bernilai “hukum positif”. Pada tingkat masyarakat, terjadi fragmentasi yang jauh lebih kompleks, melibatkan berbagai macam aliansi-aliansi organisasi massa, termasuk organisasi Islam terkemuka, seperti NU dan Muhammadiyah, dan pesantren-pesantren.

Pada penelitian ini penulis akan mencoba mengeksplorasi bagaimana gerakan politik Islam modern di Tasikmalaya bergerak dan memenangkan pertarungan ideologis. Wacana-wacana yang digulirkan oleh para aktivis Islam di Tasikmalaya seringkali menjadi hal yang menarik. Karena akan menjadi nilai jual terhadap masyarakat Tasikmalaya yang religius<sup>8</sup>. Penelitian ini mengambil tema tentang pergerakan politik Islam modern di Tasikmalaya dengan menggunakan analisis HABITUS dan FIEDL dari Pierre Bourdieu. Pertimbangan dari pemilihan tema tersebut adalah adanya perjalanan panjang perjuangan Islam di Tasikmalaya dalam memperjuangkan Islam. Perubahan politik yang terjadi dua dasawarsa belakangan ini membawa dampak pada pola perjuangan umat Islam di Tasikmalaya. Model tradisional atau cultural yang selama ini lebih dikedepankan berubah hampir seratus delapan puluh derajat menjadi model struktural.

## **B. Pembahasan**

Berbicara gerakan Islam modern dan Politik Islam di Kota Tasikmalaya tidak akan lepas dari identitas kesantrian masyarakat kota tersebut. Sebutan sebagai Kota Santri telah melekat bersama dengan lahirnya Tasikmalaya menjadi kota yang modern seperti yang kita lihat hari ini. Kota Santri yang disandang

---

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan Acep Zamzam Noor salah satu aktivis Islam di Tasikmalaya, dan juga seorang budayawan

inipun tidak akan lepas dari akar historis perjalanan Islam di daerah Tasikmalaya. Sebut saja misalnya pahlawan HZ Mustofa dan Kyai Ilyas Ruhiyat. Kedua pahlawan tersebut menjadi *icon* perjuangan dan perjalanan politik umat di tengah hingar binger politik nasional yang menggelora.

Gerakan Islam modern maupun Politik Islam telah tumbuh seiring dengan perkembangan Tasikmalaya itu sendiri. Tuntutan pemberlakuan syariat Islam dalam bentuk perda syariah begitu kuat di Tasikmalaya. Penerapan syariat Islam di Tasikmalaya dapat diteropong melalui tiga tataran penting. Pertama lewat perjuangan kemerdekaan para pahlawan dari daerah Tasikmalaya. Kedua lewat perjuangan peraturan perundangan otonomi daerah. Ketiga melalui aplikasi langsung lewat perda “berbasis” syariah. Agama, sekali lagi memberikan perilaku positif yang dimanifestasikan lewat gerakan politik yang menyebar di wilayah Tasikmalaya. Agama tidak hanya dijadikan sebagai pandangan hidup kedalam (akherat) akan tetapi dijadikan rujukan dalam memandangan dunia luar (politik).

Habitus adalah sebuah kerangka konseptual yang diperkenalkan Bourdieu untuk menjembatani dikotomi antara *agency* dan *structure* dalam kajian ilmu sosial. Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai sebuah disposisi yang sudah terinternalisir dalam diri seseorang dan terus-menerus berubah menjadi pilihan-pilihan yang melembaga di dan melekat dalam diri seseorang. Berbeda dengan cara pandang behavioralis yang menekankan pada peran individu sebagai subyek yang otonom, habitus memberi peran yang berimbang antara subyek yang otonom dan lingkungan sosial di mana seorang tinggal dan membangun relasi sosialnya.

Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan social. Di satu pihak, habitus adalah “struktur yang menstruktur” artinya habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan social. Di lain pihak, habitus adalah “struktur yang terstruktur” yakni ia adalah struktur yang distrukturisasi oleh dunia social. Dengan kata lain Bourdieu melukiskan habitus sebagai “dialektika internalisasi dari eksternalitas dan eksternalisasi dari internalitas.” Tindakanlah yang mengantarai habitus dan kehidupan social. Di satu pihak, habitus diciptakan melalui praktik (tindakan); dipihak lain, habitus adalah hasil tindakan yang diciptakan kehidupan social. Bourdieu mengungkapkan fungsi perantara tindakan ketika ia mendefinisikan habitus sebagai “system yang tertata tertuju pada...fungsi praktis.”

Sementara tindakan atau praktik cenderung membentuk habitus. Habitus pada gilirannya berfungsi sebagai penyatu dan menghasilkan praktik atau tindakan. Walau habitus adalah sebuah struktur yang diinternalisasikan, yang mengendalikan pikiran dan pilihan tindakan, namun habitus tidak menentukannya. Menurut Bourdieu, habitus semata-mata “mengusulkan” apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk dilakukan. Dalam menentukan pilihan, actor menggunakan pertimbangan mendalam berdasarkan kesadaran, meski proses pembuatan keputusan ini mencerminkan berperannya habitus. Habitus menyediakan prinsip-prinsip yang dengan prinsip itu actor membuat pilihan dan memilih strategi yang akan digunakan dalam kehidupan social.

Seperti yang dikatakan Bourdieu dan Wacquant, “orang tidaklah bodoh” namun orang juga tidaklah rasional sepenuhnya; actor bertindak menurut cara yang masuk akal. Mereka mempunyai perasaan dalam bertindak, ada logika untuk apa orang bertindak dan itulah “logika tindakan.”. Robbins mendukung pendapat yang menyatakan logika tindakan adalah “*polithetic*” yakni logika tindakan adalah kemampuan membenarkan secara serentak aneka ragam makna atau tesis yang bertentangan secara membingungkan dan secara logis (menurut logika formal) karena konteks yang menolak dari pelaksanaannya adalah tindakan<sup>9</sup>.

Pernyataan ini bukan hanya karena menekankan perbedaan antara logika praktis dan rasionalitas (logika formal), tetapi juga karena mengingatkan pada “relasionalisme” Bourdieu. Relasionalime dalam konteks ini penting karena menuntun untuk mengakui bahwa habitus bukanlah struktur yang tetap dan tidak dapat berubah, tetapi diadaptasi oleh individu yang secara konstans berubah dihadapn situasi yang saling bertentangan dimana mereka berada. Habitus berfungsi “dibawah tingkat kesadaran dan bahasa, diluar jangkauan pengamatan dan pengendalian oleh kemampuan.” Meski tidak disadari habitus dan cara bekerjanya namun ia mewujudkan dirinya sendiri dalam aktivitas kita yang sangat praktis seperti cara kita makan, berjalan, berbicara dan bahkan dalam cara membuang ingus.

Kebiasaan atau habitus ini berperan sebagai struktur, tetapi orang tidak memberikan tanggapan terhadapnya atau terhadap struktur eksternal yang mempengaruhi secara mekanis. Dialektika antara habitus dan lingkungan adalah

---

<sup>9</sup> Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Hal xx

penting karena saling menentukan. Habitus yang mantap hanya terbentuk, hanya berfungsi dan hanya sah dalam sebuah lingkungan, habitus itu sendiri adalah “lingkungan dari kekuatan yang ada”, sebuah situasi dinamis dimana kekuatan hanya terjelma dalam hubungan dengan kecenderungan tertentu. Inilah mengapa habitus yang sama mendapat makna dan nilai yang berlawanan dalam konfigurasi yang berbeda atau dalam sector yang berlawanan dari lingkungan yang sama.

Di Tasikmalaya cukup sulit menjelaskan fenomena habitus politik seperti yang digagas oleh Bourdieu. Peran struktur dalam menentukan aktifitas gerakan moden Islam bisa dirunut lebih jauh pada perjalanan gerakan politik umat Islam itu sendiri.

Penerimaan masyarakat Tasikmalaya terhadap Islam sebenarnya tidak menghapus begitu saja ikatan terhadap agama dan kepercayaan sebelumnya. Yang terjadi adalah hibridisasi pada dua tataran sekaligus, pada tataran ideologis dan pragmatis. Pada tataran ideologis, Islam diterima sebagai bentuk tanggapan terhadap ketidakmampuan nilai-nilai Sunda lama dalam menjawab tantangan perubahan yang telah melewati batas-batas komunitas yang sifatnya lokal. Sementara pada tataran pragmatis, agama dan kepercayaan lokal tetap dipertahankan sampai batas-batas tertentu karena dipandang masih mampu menjawab persoalan lokalitas yang tak mampu dijawab oleh Islam yang membawa nilai universal.

Memasuki masa Indonesia merdeka, peran Islam dalam kehidupan politik masyarakat Tasikmalaya justru mengalami peningkatan. Secara formal, Pemilu 1955 menjadi ajang pembuktian keberhasilan partai politik yang mengusung

ideologi Islam. Bahkan, ketika Orde Baru telah berkuasa, peran partai Islam dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, terutama di wilayah kota, belum menunjukkan tanda-tanda surut. Sampai di sini, masih menjadi pertanyaan tentang seberapa jauh keberhasilan partai politik Islam berkait dengan kuatnya wacana Islam dalam praktik sehari-hari masyarakat Tasikmalaya. Yang pasti, keberhasilan Islam pada tataran politik formal menjadi legitimasi sejarah yang terus direproduksi sampai sekarang oleh sebagian kalangan Islam, termasuk yang belakangan gencar menuntut pemberlakuan Perda-perda “Islami”.

Di Tasikmalaya, reproduksi ingatan terhadap gerakan Islam modern dalam sejarah Tasikmalaya tidak hanya menyangkut peristiwa-peristiwa politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Wawancara penulis dengan salah satu narasumber mengatakan:

“perjalanan gerakan politik Islam dan ekonomi umat Islam di Tasikmalaya memang tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua mata sisi uang yang saling melengkapi. Perjalanan dalam bidang politik menunjukkan hasil yang memuaskan dengan kemenangan-kemenangan partai Islam terutama PPP. Yang paling menyedihkan adalah bicara dalam masalah ekonomi. Dalam hal yang satu ini umat di Tasikmalaya selalu kalah dalam bersaing dengan etnis luar”<sup>10</sup>

Bagaimanapun, ekonomi menempati bagian terbesar dari praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, menyangkut basis material yang dapat menggerakkan kesadaran di bidang lainnya. Ketika masyarakat Tasikmalaya dikejutkan oleh huru-hara berbau etnis dan agama pada 27 Desember 1996, beberapa pengamat menyebut tersingkirnya kalangan santri dalam dominasi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Asep ZN tanggal 3 Oktober 2012

ekonomi Tasikmalaya sebagai akar dari kecemburuan sosial yang menyulut huru-hara tersebut.

Kalangan santri dikatakan tersingkir oleh persekutuan tak terpuji antara birokrasi Orde Baru dengan para pengusaha etnis Cina. Keadaan ini ironis, sebab di masa lalu kalangan santri itu adalah para pengusaha sukses, terutama dalam industri batik dan kerajinan tangan. Salah satu koperasi terbesar di Tasikmalaya pada 1950-an adalah Koperasi Mitra Batik yang dimiliki para pengusaha santri. Pada masanya, mereka memiliki pabrik kain mori terbesar di Jawa Barat, mengalahkan sejawat mereka di Majalaya, Bandung.

Akan tetapi, akibat perubahan politik yang cepat, sementara secara internal mereka belum cukup kuat, Koperasi Mitra Batik mengalami kemunduran amat drastis, sampai pada akhirnya menghentikan sebagian besar usahanya ketika terjadi krisis ekonomi yang mengawali jatuhnya Orde Baru sekitar tahun 1997. Tetapi, jauh sebelum itu, tepatnya sekitar akhir 1980-an, koperasi itu tidak lagi berfungsi sebagai koperasi batik yang dapat diandalkan oleh para anggotanya. Para anggotanya yang terkemuka lebih memilih bekerja sendiri-sendiri tanpa terikat secara kelembagaan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Mitra Batik telah rusak oleh adanya korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh sebagian pengurus, sementara di sisi lain pemerintah hanya membiarkan hal itu terjadi tanpa pernah memperlihatkan usaha membantu memperbaikinya.

Akan tetapi, penyebab yang muncul dan direproduksi ke dalam wacana publik dari peristiwa-peristiwa tersingkirnya kaum santri dari kehidupan ekonomi

Tasikmalaya adalah adanya Islam-fobia, terutama di kalangan birokrat Orde Baru. Oleh karena itu, ketika Orde Baru kehilangan faktor-faktor penting yang memungkinkan mereka mengontrol masyarakat, sebagian kalangan Islam dengan mudah memanfaatkan sentimen keagamaan dalam penyebaran ide-ide mereka.

Gerakan politik umat Islam yang termanifestasikan lewat partai politik sedikit banyak mengungkap cara pandang dan penghayatan orang Tasikmalaya tentang cara menggapai tujuan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat bisa diraih dengan membentuk sebuah organisasi modern yang efektif dalam rangka mencapai kekuasaan. Cara pandang keluar yang demikian membentuk pola habitus politik yang unik pula dari gerakan-gerakan sosial yang lainnya. Kebiasaan yang sudah terinternalisasi sejak zaman dahulu dengan memasuki ruang politik bagi gerakan Islam modern di Tasikmalaya merupakan sebuah keniscayaan.

Penulis mewawancarai salah satu narasumber yang mengatakan bawah:

“pola penghayatan, pola pikir, dan pola tindak masyarakat Tasikmalaya terutama kaum elitnya menunjukkan bahwa mereka mewarisi semangat para pendahulunya. Kebiasaan yang dibangun oleh para tokoh ulama yang berasal dari Tasikmalaya ini diestafetkan kemudian kepada generasi muda di Tasikmalaya, dan hasilnya bisa Anda lihat sendiri. Semangat gerakan Islam di Tasikmalaya tidak pernah surut”<sup>11</sup>

Lihat saja misalnya Kemenangan partai-partai Islam di Tasikmalaya, baik di Kota maupun di Kabupaten, pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009 mengantarkan banyak aktifisnya untuk duduk di kursi-kursi DPRD dan jabatan-jabatan birokrasi struktural. Merekalah yang kemudian menjadi garda depan untuk memobilisasi wacana Islam menjadi sesuatu yang bernilai “hukum positif”. Akselerasi yang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Asep ZN tanggal 3 Oktober 2012

dilakukan para tokoh birokrat akan membentuk habitus politik pada generasi selanjutnya.

Kebiasaan politik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi maupun partai politik di Tasikmalaya, terutama di ruang public, menjadikan gerakan Islam Modern di Tasikmalaya membentuk pola yang tetap, mereka bermain dan melembagakan gerakannya dalam lembaga-lembaga politik. Gerakan yang dimulai dari akar rumput dan menjadi kebiasaan secara terus menerus menjadi semacam “sinyal positif” bagi gerakan Islam modern di tingkat elit untuk melembagakannya.

Pola gerakan yang telah terstruktur dalam ranah public di Tasikmalaya secara individu dan dalam jangka waktu lama telah membentuk pula pola struktur dalam kelembagaan Negara. Inilah yang dimaksud struktur yang menstrukturkannya Bourdieu yang berarti bahwa sebuah struktur yang menstruktur kehidupan social. Di lain pihak, habitus adalah “struktur yang terstruktur” yakni ia adalah struktur yang distrukturisasi oleh dunia social. Dengan kata lain Bourdieu melukiskan habitus sebagai “dialektika internalisasi dari eksternalitas dan eksternalisasi dari internalitas.” Disinilah relevansinya antara konsep habitus yang digagas Bourdieu dengan realitas gerakan modern Islam di Tasikmalaya. Gerakan yang konstan dalam jangka waktu lama yang berdasarkan pada pandangan keagamaan akan membentuk juga pola struktur pada tataran praktis di tingkat struktur Negara atau masyarakat.

### **C. Kesimpulan Dan Saran**

Dalam penelitian ini penulis bisa menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjalanan gerakan Islam Modern di Tasikmalaya telah muncul semenjak dulu dengan geneologi yang dapat kita lacak dari adanya dakwah Islam ke daerah ini. Ketika Syekh Abdul Muhyi untuk pertama kalinya menyebarkan Islam di daerah Tasikmalaya pada akhir abad XVII, peranan yang diberikan bupati Tasikmalaya, R.T. Wiradadaha III, dalam proses tersebut tidak lagi hanya bersifat pribadi, tetapi bahkan sudah melibatkan instrumen kelembagaan. Bupati yang terkenal dengan sebutan Dalem Sawidak karena mempunyai anak 62 orang itu secara hampir total mendukung Islamisasi yang dipimpin oleh Syekh Abdul Muhyi. Salah seorang anaknya, R. Subamangala, bahkan diserahkan kepada Syekh Abdul Muhyi untuk diasuh sejak usia belia. Akibat dari kuatnya hubungan antara ulama dan penguasa di Tasikmalaya, seperti yang ditunjukkan oleh tokoh pionirnya tersebut, menjadikan Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai agama baru.
2. Habitus Politik yang digagas oleh Bourdieu, menyiratkan “struktur yang menstruktur” gerakan maupun kebiasaan yang dilakukan. Untuk menjelaskan antara konsep Bourdieu dan kenyataan yang ada dalam gerakan Modern Islam di Tasikmalaya tidak bias terlepas dari adanya peranan politik umat Islam di Tasikmalaya. Bagaimana gerakan Modern Islam yang secara terus menerus membiasakan mengikuti pola gerakan politik di akar rumput menjadi sinyal yang baik untuk segera melembagakan habitus politik tersebut menjadi sebuah struktur politik yang tetap berkelanjutan.

3. Kemenangan partai-partai Islam di Tasikmalaya menjadikan gerakan Islam modern lebih terlembagakan secara formal. Banyak pejabat-pejabat yang diduduki oleh orang-orang yang berasal dari kalangan Islam.
4. Tasikmalaya memberikan contoh yang menarik bagaimana Islam kemudian menjadi wacana dominan dalam kehidupan simbolis penduduknya. “Islamisasi” kemudian tidak lagi diperdebatkan di ruang-ruang sidang DPRD atau sejenisnya, tetapi, misalnya, dalam simbol-simbol di jalan raya. Penguasa coba melegitimasi kekuasaannya dengan simbol-simbol Islam dalam bentuk yang tidak lagi terbatas pada serentetan aturan-aturan formal, tetapi pada imaji-imaji yang dikonstruksikan kepada publik dalam bentuk-bentuk yang tak-terpikirkan.

Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Islam moden harus lebih bisa mentranfer kebiasaan politik yang baik di tingkat akar rumput, karena hal tersebut akan menjadikan terstrukturnya kebiasaan-kebiasaan tersebut pada tingkat yang lebih atas.
2. Gerakan politik Islam modern yang di gawangi oleh partai politik islam dan organisasi Islam harus mempertahankan kebiasaan yang akan selalu diestafetkan kepada generasi selanjutnya. Kebiasaan yang akan menstruktur pola yang sama pada generasi selanjutnya harus menjadi alasan kuat untuk membuat “pusat teladan” yang Islami.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Said Gatara dan Dzulkih Said, *Sosiologi Politik. Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2007
- Al Anshari, Mahmud, *Penegakan Syariat Islam. Dilema Keumatan di Indonesia.*, Depok Inisiasi Press, 2005
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.* Cambridge: Harvard University Press, 1984
- Boland, B.J, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Gratifi Pers, 1985
- Harrison, Lisa *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila sbagai Dasar Negara*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
- Muhajir, Noeng “*Metodologi Peneltian Kualitatif Edisi IV*, Jogjakarta, Rake Sarasin, 2000
- Ruslan, Rosadi “*Metode Peneltian. Public Relatios dan Komunikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Santoso, Amir dan Riza Sihbudi, 1993, *Politik, Kebijakan dan Pembangunan*, Jakarta: Dian Lestari Grafika.
- Tangkilisan, Drs Hessel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Aris Kurniawan, 2009, *Implementasi Kebijakan Studi Kasus Tentang Penerapan Perda Syariah di Indonesia*, Tesis, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada

## Sumber Lain

hand out mata kuliah “Statistik Sosial” oleh Harun Ar Rasyid

Artikel [‘Islam Priangan: Pergulatan Identitas dan Politik Kekuasaan](#), amin mudzakkir <http://penelitianku.wordpress.com/> Diakses tanggal 1/02/10. Jam 11.00

Prof.Dr. Thomas Mayer ”*Politik Identitas. Tantangan Terhadap Fundamentalisme Modern*”,

<http://ihsansetiadilatief.blogdetik.com/2009/04/15/perda-berbasis-syariah-%EF%80%AA/>. Diakses tanggal 28/01/10 jam 11.05

berita detik.com, <http://ihsansetiadilatief.blogdetik.com/2009/04/15/perda-berbasis-syariah-%EF%80%AA/>, Diakses tanggal 20 Januari 2010 jam 13.30 wib

Miftahul falah “*Sejarah Kota Tasikmalaya*”,

<http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/02/sejarah-kota-tasikmalaya-1820-1942.html>. diakses tanggal 28/01/10 Jama 10.35

Muhammad Solihin “*Senjakala Politik Identitas 2009*”, <http://www.psik-indonesia.org/home.php?page=fullnews&id=32>, diakses tanggal 3/02/2010 jam

10.15

tulisan Tedi Akhmad Al Ghifari,

<http://khabarislam.wordpress.com/2009/02/15/menanti-perda-syariat-islam-di-kota-santri/>

Amin Mudzakkir, “*Menjadi Kota Santri: Wacana Islam dalam Ruang Urban di Tasikmalaya*”, <http://penelitianku.wordpress.com/>. Diakses tanggal 14/01/10. Jam 09.10